

ISSN 2828-285x



# POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN  
BIOSAINS TROPIKA**  
Vol. 5 No. 1 Tahun 2023

Strategi Komunikasi Pencegahan dan  
Penanganan Kekerasan pada Perempuan  
dan Anak Pasca Pandemi COVID-19  
di Kota Bogor

Penulis

 **Dyah Retna Puspita<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

# Ringkasan

---

## Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- (a) Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024: “Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”
- (b) Pandemi Covid-19 telah meningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di banyak wilayah, termasuk Kota Bogor.
- (c) Strategi komunikasi sangat dibutuhkan dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pasca pandemi Covid-19.

## Ringkasan

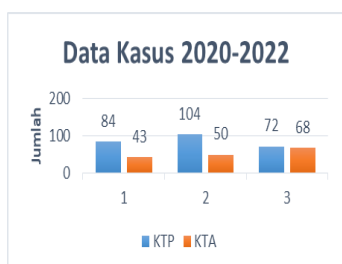
*Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor disikapi DP3A Kota Bogor dengan merancang strategi komunikasi penanganan dan pencegahannya. Pertama, optimalisasi pencegahan kasusnya melalui sosialisasi dan edukasi ke berbagai elemen masyarakat dengan membentuk lembaga Puspaga, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh kelurahan serta Posyandu multifungsi yang menambahkan penyuluhan ketahanan keluarga di dalamnya. Kedua, optimalisasi penanganan kasusnya dengan membentuk UPTD PPA. Kendalanya adalah belum banyaknya PATBM dan Posyandu multifungsi yang beraktivitas, kurangnya tenaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga UPTD PPA, serta minimnya anggaran. Untuk itu diajukan beberapa rekomendasi.*

# Strategi Komunikasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Bogor

## Pendahuluan

Kota Bogor memiliki visi yang sangat berorientasi pada keluarga yakni “Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”. Untuk itu, perlu dikaji strategi komunikasinya dalam menangani dan mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan kekerasan terhadap anak (KTA) yang selama pandemi Covid-19 jumlah kasusnya meningkat.

Selama masa pandemi tahun 2020-2021, terjadi peningkatan kasus yang ditangani Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor, dari 127 kasus menjadi 154 kasus. Adapun pada tahun 2022, kasusnya sebanyak 140 kasus. Secara keseluruhan, jumlah kasus KTP lebih banyak dibandingkan KTA dan kebanyakan berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



Grafik 1: Data Kasus yang ditangani Tahun 2020-2022

Sumber: DP3A - UPTD PPA Kota Bogor, 2022

Lembaga yang paling terkait dengan permasalahan tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengkaji strategi komunikasi DP3A Kota Bogor dalam mencegah

peningkatan kasusnya pasca pandemi Covid-19. Sasaran penelitiannya adalah para pejabat di lingkungan DP3A yakni Kepala Bidang (Kabid) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, (2) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan (3) Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga serta beberapa staf yang terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta observasi.

Menurut Effency (2006), strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Ia adalah bagian dari suatu rencana, sedangkan rencana merupakan produk dari perencanaan, yang pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari fungsi manajemen. Jadi, strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya (Rosady, 2000).

Dengan mengkaji strategi komunikasi pada DP3A Kota Bogor dalam upayanya mencegah dan menangani kasus-kasus KTP dan KTA pada masa/era pasca Covid-19, akan dapat dikaji sejauh mana tingkat keseriusan lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kendala-kendala yang dihadapinya.

Kajian ini diharapkan akan memperkuat beberapa kajian serupa sebelumnya, antara lain di Aceh (Subhan *et. al*, 2022), Bengkulu (Anggraini dan Fajarini, 2021), Garut (Suzanna *et. al*, 2014) dan Surabaya (Oktaviani dan Jatningsih, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa isu KTP dan KTA adalah merupakan isu nasional. Bahkan, isu penghapusan KTA memang merupakan komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang harus dituntaskan pada tahun 2030 oleh para anggota PBB termasuk

Indonesia. Tekad menghapus KTP ini tercantum dalam Target 5.2. Adapun penghapusan KTA termuat dalam Target 16.2 *SDGs*. Untuk itulah, kajian tentang strategi komunikasi DP3A Kota Bogor sebagai OPD yang mengemban tugas yang terkait dengan upaya tersebut menjadi perlu dilakukan. Terlebih lagi dikaitkan dengan Visi Kota Bogor yang sangat berorientasi pada keluarga.

## Pembahasan

DP3A adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga ini terdiri dari tiga Bidang yakni: (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, (2) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan (3) Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga. Di samping itu, terdapat lembaga layanan penanganan kasus KTP dan KTA bernama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). DP3A Kota Bogor beralamat di Jl. Ciwaringin No. 11 Kecamatan Bogor Tengah, sedangkan UPTD PPA berlokasi di Jl. Destarata IV No. 3 Kecamatan Bogor Utara.

Tugas dan fungsi lembaga tersebut adalah mendukung pencapaian Misi Pemerintah Kota Bogor kedua dan ketiga yakni mewujudkan Kota Bogor yang cerdas dan sejahtera. Upaya tersebut dilaksanakan dengan menerapkan dua strategi besar yakni melakukan pencegahan terhadap timbulnya KTP dan KTA serta melakukan penanganan atas kasus-kasus tersebut yang masuk ke DP3A melalui UPTD. Berikut ini penjelasannya.

### 1.1 Strategi Pencegahan

Upaya pencegahan KTP terutama dilakukan oleh Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga. Kegiatannya adalah berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari tingkat kota sampai ke tingkat wilayah kelurahan. Pelaksanaannya bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait (antara lain Dinas

Pendidikan), pihak swasta, Perguruan Tinggi, lembaga masyarakat dan media massa. Disediakan juga sarana konseling melalui Lembaga Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) baik secara *offline* maupun online dengan menyediakan *hotline* pada jam kerja yang dikelola 2 orang konselor.

Di tingkat kelurahan, dibentuk Satgas KDRT serta ditunjuk juga 5 (lima) tenaga Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) dan PPJ yang merupakan fasilitator yang diinisiasi Pemerintah Provinsi. Untuk lebih mengarah kepada seluruh masyarakat, dilakukan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga layanan keluarga seperti PKK (khususnya dengan Pokja I yang menangani Ketahanan Keluarga) serta mengoptimalkan pelayanan Posyandu menjadi Posyandu multifungsi yang menyediakan penyuluhan seputar ketahanan keluarga.

Adapun untuk kegiatan pemberdayaan perempuan, Bidang Pemberdayaan Perempuan melakukan kegiatan pelatihan dan pemotivasian bagi penyintas/korban kekerasan serta bagi Pekka (Perempuan Kepala Keluarga).

Sementara itu, untuk upaya pencegahan KTA, DP3A Kota Bogor khususnya Bidang Perlindungan Anak serta Bidang Data, Informasi dan Peningkatan Kualitas Keluarga melakukan beberapa kegiatan seperti: sosialisasi dan edukasi Sekolah Ramah Anak, pelatihan konselor sebaya dalam memecahkan masalah, dan pencegahan kekerasan anak di lingkungan sekolah. Sasarannya adalah sekolah-sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA, baik yang sudah diagendakan maupun insidental (atas dasar permintaan suatu sekolah).

Kegiatan lainnya adalah membentuk Pengelolaan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tiap kelurahan. Tim tersebut bersifat sosial/ sukarela yang terdiri dari beberapa orang yang diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Kelurahan.

Di samping komunikasi melalui pembentukan lembaga, dilakukan strategi komunikasi sosialisasi KTP dan KTA di area-area publik seperti mall dan taman-taman. Waktu sosialisasinya biasanya dikaitkan dengan event-

event tertentu seperti: Peringatan Hari Anak, Hari Keluarga dan sebagainya.

## 1.2 Strategi Penanganan

Di samping upaya pencegahan terjadinya KTP dan KTA yang bersifat preventif, DP3A Kota Bogor juga melakukan penanganan terhadap kasus-kasus KTP dan KTA yang masuk ke UPTD PPA. Informasi kasus dapat berasal dari korban yang kebanyakan datang langsung maupun menghubungi melalui telepon/*hotline*, ada juga yang berasal dari rujukan lembaga lain seperti Kepolisian.

UPTD PPA dibentuk berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 5657 /OT.03/Org tanggal 1 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tipe B yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 145 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Tugas UPTD PPA adalah memberikan enam jenis pelayanan berupa: pengaduan, pendampingan, penjangkauan, pengelolaan kasus, mediasi dan penampungan sementara. Dalam menjalankan tugas ini, lembaga ini dipimpin oleh Kepala dengan satu orang Pengawas Perempuan dan Anak, satu orang advokat, dua konselor, dua pendamping dan satu tenaga administrasi. Dari semua pegawai tersebut, hanya Kepala dan Pengawas yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara), sedangkan lainnya adalah tenaga kontrak.

Pada tahun 2022, lembaga tersebut menangani 140 kasus. Kasus tersebut datang dari semua kecamatan di Kota Bogor dengan jumlah kasus terbanyak (baik korban maupun pelaku) berasal dari Kecamatan Bogor Utara (35 kasus atau 25 persen) dan Bogor Barat (33 kasus atau 23,57 persen). Namun demikian, banyak juga pelaku yang tidak diketahui identitasnya.

Bentuk KTP terbanyak adalah KDRT (40,79 persen) mencakup semua jenis kekerasan, terutama kekerasan fisik (33,33 persen) dan psikis (22,91 persen). Sebagian besar pelakunya (termasuk pada KTA) berusia 36 - 45 tahun. Kelompok perempuan

usia 26-35 tahun paling rentan menjadi korban (18,5 persen). Kebanyakan mereka adalah ibu rumah tangga dan pelajar, sedangkan pelaku adalah swasta/buruh. Baik korban maupun pelaku kebanyakan berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Baik KTP maupun KTA, kebanyakan berupa kekerasan seksual. Dari 25 kasus kekerasan seksual terhadap anak, kebanyakan dilakukan oleh tetangga (11 kasus) dan ayah tiri (3 kasus) (UPTD PPA Kota Bogor, 2022).

Dengan banyaknya perempuan (baik istri maupun anak) yang menjadi korban KDRT (terutama secara fisik dan seksual), tampak bahwa saat ini banyak rumah yang tidak lagi menjadi tempat yang aman yang memberikan ketenangan dan perlindungan bagi mereka. Untuk itu, upaya pencegahannya harus semakin ditingkatkan. Terlebih lagi, Visi Kota Bogor secara eksplisit berkomitmen tinggi untuk terwujudnya Kota Bogor yang ramah bagi keluarga.

## 1.3 Hambatan

Dalam kenyataannya, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan DP3A Kota Bogor masih menemui beberapa kendala berupa: keterbatasan tenaga sosialisasi untuk dapat menjangkau semua wilayah (enam kecamatan dengan 68 kelurahan), keterbatasan anggaran serta kurangnya koordinasi dan jejaring dengan OPD-OPD yang terkait seperti DPPKB, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama.

Adapun hambatan pada penanganannya adalah berupa: (a) belum terbangunnya sistem layanan yang terstandar dan terintegrasi, (b) kurangnya pendampingan lainnya, (c) keterbatasan anggaran operasional, (d) kurangnya koordinasi dan sinergi dengan OPD lembaga penyedia layanan, serta (e) kurangnya upaya promotif dan preventif.

## Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan strategi yang dijalankan serta kendala yang dihadapi, direkomendasikan untuk:

1. Meningkatkan jejaring dengan organisasi PKK Kecamatan yang memiliki cabang hingga ke

tingkat Rukun Tetangga (RT) dan bahkan Dasa Wisma (lingkungan dengan 10-an rumah).

2. Meningkatkan jejaring dengan Dinas Sosial, agar bantuan sosial benar-benar diberikan kepada keluarga-keluarga miskin, karena salah satu penyebab KDRT adalah masalah ekonomi.
3. Melibatkan tokoh-tokoh agama (para dai dan penghulu) untuk ikut mensosialisasikan upaya pencegahannya di kalangan warga laki-laki (karena kebanyakan pelaku adalah laki-laki) serta pada khotbah-khotbah pernikahan.
4. Melibatkan unsur akademisi yang mempunyai bidang kajian dan kepedulian seputar keluarga, agar dapat mensosialisasikannya pada kegiatan pengabdian masyarakat mereka.

## Daftar Pustaka

Anggraini F, Fajarini SD. (2021). Strategi Komunikasi dalam Pencegahan KDRT di Kota Bengkulu (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu). *J-SIKOM*, 2(2).

Ardianto E. (2013). *Handbook of Public Relations: Pengantar Komprehensif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - UPTD Kota Bogor. 2022. Catatan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022

Effendy OU. (2006). Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosda karya. Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Oktaviani I, Jatiningsih O. (2022). Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mencegah

Kekerasan dalam Rumah Tangga di Surabaya. *Jurnal Konsepsi*, 11(2), 252-271.

Radar Bogor. 27 April 2022. UPTD PPA Kota Bogor, Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Subhan AB, Sumiyatun S, Safrida V, dan Efendi M. (2022). Strategi Komunikasi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *RESAM Jurnal Hukum*, 8(2), 138-150.

Suzanna LH, Dewi RU, Raturahmi L. (2014) Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KDRT) di Kabupaten Garut.

[UPTD PPA] Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 2022. *Catatan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022*.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

## Author Profile



**Dyah Retna Puspita**, merupakan Dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University. Memiliki kepakaran dalam Gender dan Penyuluhan Pembangunan Pertanian. (**Corresponding Author**)  
[dyahretna@apps.ipb.ac.id](mailto:dyahretna@apps.ipb.ac.id)



**Telepon**

+62 813 8875 4005



**Email**

[dkasra@apps.ipb.ac.id](mailto:dkasra@apps.ipb.ac.id)



**Alamat**

Gedung LSI Lt. 1  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga  
Bogor - Indonesia 16680